

**REKONSTRUKSI SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBAHAN MINERAL DAN BATUBARA
BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh
Sarkowi V. Zahry, S.Hut, MM, M.Si
NIM: 10301700105

DISERTASI

Untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang ilmu hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Dipertahankan pada tanggal 27 Februari 2020
Di Universitas Islam Sultan Agung



**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2020**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI
REKONSTRUKSI SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PERTAMBAHAN MINERAL DAN BATUBARA
BERBASIS NILAI KEADILAN

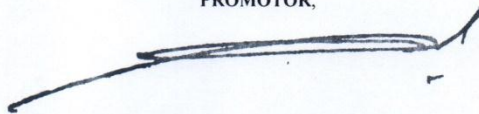
Oleh
Sarkowi V. Zahry, S.Hut, MM, M.Si
NIM: 10301700105

DISERTASI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini.
telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal
seperti tertera di bawah ini

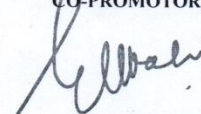
Semarang, Februari 2020

PROMOTOR,



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum
NIDN: 06.0503.6205

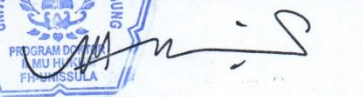
CO-PROMOTOR,



Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum
NIDN: 06.2804.6401



Mengetahui,
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung


Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum
NIDN: 06.2105.7002

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sarkowi V. Zahry, S.Hut., M.M., M.Si
NIM : 10301700105
Alamat : Jl. KH. Dewantara, No 11, RT. 01, Kel. Panji, Kec. Tenggarong
Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Judul : Rekonstruksi Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Dalam
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan
Mineral Dan Batubara Berbasis Nilai Keadilan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doctor) baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah/Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 24 Februari 2020

METERAI
TEMPEL
006F7AFF569890000
6000
ENAM RIBURUPIAH
Sarkowi V. Zahry, S.Hut., M.M., M.Si
NIM: 10301700105

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat limpahan rahmat, karunia, dan pengetahuan-Nya, penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Shalawat serta salam, penulis haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai junjungan dan suri tauladan bagi kita umat Islam.

Penulis menyadari bahwa disertasi yang berjudul: **“REKONSTRUKSI SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA BERBASIS NILAI KEADILAN”** ini masih belum dapat dikatakan sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan disertasi ini.

Dengan rasa hormat, disertasi ini penulis persembahkan untuk Ayahanda dan Ibunda (Ayahanda Alm. Supangat Vonisan Zahry dan Ibunda Alm. Siti Fatimah) yang sejak dulu selalu memberikan dorongan kepada penulis dalam melanjutkan pendidikan. Juga kepada Istriku tercinta Roessalina Arfansyah Zahry, serta anak-anakku: Muhammad Galang Arya Mahendra Arkarna, Aura Quranique Salsabila Ramadhania dan Muhammad Ghazi Ahza Muhana Senawacita, yang telah memberikan doa, dukungan luar biasa dan motivasi kepada penulis agar selalu semangat dalam melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan.

Dalam penyusunan disertasi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan juga penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setiyawan MT.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus

Promotor yang telah memberikan bimbingan dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan disertasi;

3. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Ibu Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus Penguji yang sangat perhatian dan memberikan masukan yang luar biasa;
5. Ibu Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum selaku Co-Promotor yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi ini;
6. Ibu Prof Dr. Hj. I Gusti Ayu KRH, S.H.,M.Hum, Bapak Prof. Dr. H. Mahmutarom HR, S.H.,M.Hum, yang dengan segala kearifan telah berkenan menguji hasil karya penulis dan memberikan masukan yang luar biasa;
7. Ibu Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Bapak H. Awang Dharma Bakti, S.T.,M.T. Ketua Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda beserta Jajaran atas dukungannya;
9. Bapak Dr. Marjoni Rachman, M.Si Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda atas dukungan dan motivasi tiada henti untuk keberhasilan Penulis dalam menyelesaikan studi;
10. Bapak Dr. Ir. H. Zikri Azham, MP (Wakil Rektor I), Almarhum Prof. Dr. FL Sudiran, M.Si (Wakil Rektor II), Dr. H. Abdul Kholik Hidayah, M.P. (Wakil Rektor III) Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda atas bantuan semangat;

11. Ibu Hj. Nora Suzuki Mokodompit, PhD Direktur Pusat Kajian Bahasa, Bapak Ir.H. Abdul Rahmi, MP Kepala SDM dan Bapak Prof. Dr. H. Edy Soegiarto, MM Kepala LPPM Untag 1945 Samarinda atas motivasi dan dukungannya ;
12. Ibu Kunti Widayati, S.H.,M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda atas dukungannya;
13. Ibu Isnawati, S.H.,M. (Wakil Dekan I), M.H.Bapak Sukindar, S.H., (Wakil Dekan II), Bapak Syamsul Bahri, S.H.,M.Hum (Wakil Dekan III) dan Bapak Dr.H. Syamsudin, S.H.,M.Hum (Kaprosdi) Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda untuk dukungan dan kerjasamanya ;
14. Ibu Hj. Fatimah Asyari, S.H., (Ketua), Amin Slamet, S.H.,M.H., (Sekretaris), Drs. Sayid Irwan, M.Hum (Bendahara) dan Mia Kusuma Fitriana,S.H.,M.Hum (Peneliti) Tim PUSLIT 17 Agustus 1945 Samarinda atas perhatian dan pengertian juga dukungan yang tiada henti ;
15. Bapak-bapak dosen terutama Prof Dr. H.Ahmad Rofik, MA, dan Bapak Dr. H. Akhmad Khisni, SH, M.H, serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih bantuannya selama ini;
16. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kerjasama dan bantuannya selama ini ;
17. Sahabat calon doktor Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Ibu Isnawati, Pak Kamal, Pak Dahri Yasin, Mas Sarikun, Pak Sofiyon, Pak Syamsul, Pak Komela, Bu Esty, Bu Iis dan Bu Umi atas kerjasama hingga terselesaikannya disertasi ini

18. Terimakasih dengan setulus hati kepada adik Mas'ud V Zahry dan istri, para staf Sabar, Agus Ramadan, Yudi, Alfian, Hafid, Anton, Imam dan semua teman-teman yang selama ini telah membantu yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah mendukung mulai sejak awal hingga selesainya penulisan disertasi ini.

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai rekonstruksi sanksi pidana terhadap korporasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, memang ditemukan berbagai kelemahan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, di antaranya adalah ketidakjelasan subjek hukum korporasi, belum diaturnya sanksi terhadap pemegang izin pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban reklamasi dan pascatambang, adanya multitafsir norma hukum, disparitas pemidanaan dan sanksi pidana belum berorientasi kelestarian lingkungan. Kelemahan ini harus dicari upaya penyelesaiannya, dan dilakukan rekonstruksi agar penerapan sanksi pidana terhadap korporasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 bisa berbasis nilai keadilan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa disertasi penulis ini belum sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak. Semoga Allah S.W.T senantiasa memberikan rahmat, petunjuk, kemudahan serta keberkahan kepada penulis dalam kerangka Rahmatan lil alamin. Aamiin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 24 Februari 2020

Penulis